



RENJA

RENCANA KERJA



...

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Putussibau, 10 Juli 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL/ LAMPIRAN	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	3
BAB II.....	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.....	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN	5
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	7
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	7
BAB III	8
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	8
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	9
BAB IV	11
PENUTUP.....	11
LAMPIRAN.....	12

DAFTAR TABEL/ LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
LAMPIRAN I.....	13
LAMPIRAN II	15
LAMPIRAN III.....	16
LAMPIRAN IV.....	26
LAMPIRAN V	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan system pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rancana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.

2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangn-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yaitu ***”Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kondusif melalui Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”***

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
2. Meningkatkan Kesadaran dan ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Meningkatkan Operasional melalui Penertiban, Penindakan Pelanggaran serta pembinaan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
4. Menyelenggarakan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana secara Profesional dan Terkoordinasi.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara Malaysia maupun dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara;
- b. Isu Primordialisme, Ras dan Keagamaan;

- c. Kebijakan pemerintah pusat yang mengganggu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya misalnya penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak dapat mengolah dan mengelola hasil hutan.
- d. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Kabupaten Kapuas Hulu.
- e. Cuaca ekstrim dan tidak menentu menimbulkan kecemasan masyarakat;
- f. Kabut asap sebagai akibat pembakaran ladang, lahan, dan hutan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel 2.4.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan gangguan keamanan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam lampiran tabel 2.5.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sesuai dengan Renstra adalah :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Trantibmas;
- b. Mantapnya ketentraman dan ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif;
- c. Meningkatnya Pencegahan Dini Bencana Alam;
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

Adapun sasaran dari Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Terwujudnya pencegahan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
- d. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan serta Penanganan Kebakaran.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana dan Program merupakan salah satu langkah implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 9 Program dengan 68 Kegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi Perencanaan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun 2019 sedikit berbeda dari rancangan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan terdapat tambahan program dan kegiatan yang sangat penting terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja, untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.3.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentran serta penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertian dan ketentraman serta penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 10 Juli 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



LAMPIRAN I

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
 Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
 Provinsi Kalimantan Barat
 Kabupaten Kapuas Hulu
 Kota Putussibau

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun..... (tahun 2016)	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2018	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+(9)*	11=(10/4)*	12
01	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi BAIK	100	100	95	100	1,05	95	295	2,95	
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	100	100	95	100	1,05	95	295	2,95	
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	100	100	0	0	0	95	195	1,95	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	100	99	0,99	95	294	2,94	
20	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih	0	0	0	0	0	95	95	100,00	
16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	100	100	100	79	0,79	95	274	2,74	
19	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	0	0	100	100	1,00	95	195	100,00	

22	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Cakupan Wilayah rawan bencana	100	100	100	79	0,79	95	274	2,74	
----	---	-------------------------------	-----	-----	-----	----	------	----	-----	------	--



LAMPIRAN II

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Kapuas Hulu
Kota Putussibau

No	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)	Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk			5,07195	4,97251	5,11091	5,2419588	5,3659219	5,4368743	5,57319	6,130509	
2.	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK		Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	96	96	96	96	96	96	96	105,6	
3.	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda		Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	0,65752	0,64463	0,63199	0,6195991	0,619587	0,627591	0,629042	0,6919462	
4.	Persentase Daerah rawan bencana			65	74	87	-	66	75	88	96,8	
5.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran			0,0002	0,004	0,006	-	0,0004	0,005	0,008	0,0088	
6.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam			75	75	75	-	76	76	76	83,6	
7.	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasaran Penanggulangan Bencana alam dan Kebakaran			83	83	83	-	84	84	84	92,4	

LAMPIRAN III

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		4.341.171.700					5.502.275.500	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95%	4.564.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95%	4.900.000	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Presentase pembayaran air, listrik, telpon dan jaringan internet	95%	35.460.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Presentase pembayaran air, listrik, telpon dan jaringan internet	95%	46.200.000	
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	95%	18.725.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	95%	18.725.000	
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	95%	100.740.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	95%	117.540.000	
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	95%	23.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	95%	35.600.000	
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satpol PP	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	95%	86.376.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satpol PP	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	95%	86.376.500	
	7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95%	24.790.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95%	31.375.000	
	8. Penyediaan	Satpol PP	Persentase	95%	11.105.500	Penyediaan	Satpol PP	Persentase	95%	15.980.000	

	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95%	18.100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95%	101.850.000	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Satpol PP	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95%	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Satpol PP	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95%	12.000.000	
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol PP	Persentase penyediaan makanan dan minuman	95%	200.040.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol PP	Persentase penyediaan makanan dan minuman	95%	338.750.000	
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ibukota Provinsi dan Pemerintah Pusat	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	95%	345.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ibukota Provinsi dan Pemerintah Pusat	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	95%	615.938.000	
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	95%	397.080.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	95%	542.400.000	
14.	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	95%	244.790.000	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	95%	538.327.000	
15.	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	95%	2.804.400.000	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Satpol PP	Persentase Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	95%	2.804.400.000	
16.	Penyediaan Jasa Publikasi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyediaan Jasa Publikasi	95%	15.000.000	Penyediaan Jasa Publikasi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyediaan Jasa Publikasi	95%	15.000.000	
17.						Pelaksanaan Analisis Jabatan	Satpol PP	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan	95%	12.900.000	

	18					Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Satpol PP	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	95%	84.014.000	
	19					Pengelolaan Pengembangan Website Satpol PP		Persentase Pengelolaan Pengembangan Website Satpol PP	95%	80.000.000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK		1.201.930.000			Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK		2.303.200.000	
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satpol PP	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	95%	678.300.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satpol PP	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	95%	1.691.300.000	
	2. Pengadaan Mebeleur	Satpol PP	Persentase pengadaan mebeleur	30%	32.550.000	Pengadaan Mebeleur	Satpol PP	Persentase pengadaan mebeleur	30%	32.550.000	
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Sat Pol PP	Persentase terlaksananya pemeliharaan/berkala kendaraan dinas operasional	65%	361.730.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Sat Pol PP	Persentase terlaksananya pemeliharaan/berkala kendaraan dinas operasional	65%	450.000.000	
	4. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Sat Pol PP	Persentase Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	95%	129.350.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Sat Pol PP	Persentase Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	95%	129.350.000	
III.	Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya		328.150.000			Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya		271.350.000	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sat Pol PP	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	95%	161.350.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sat Pol PP	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	95%	191.350.000	
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Untuk Hari - Hari Tertentu	Sat Pol PP	Persentase Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	95%	166.800.000	Pengadaan Pakaian Khusus Untuk Hari - Hari Tertentu	Sat Pol PP	Persentase Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	95%	80.000.000	

IV.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten		985.518.000			Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten		1.508.415.000	
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibukota provinsi dan luar ibukota provinsi	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,95	798.413.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibukota provinsi dan luar ibukota provinsi	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal	95%	940.350.000	
	2. Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP	Persentase Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	0,95	46.450.000	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP	Persentase Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	95%	46.450.000	
	3					Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Prosentase penyelenggaraan bimtek dasar polisi pamong praja dalam 1 tahun	95%	147.500.000	
	4. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP	Persentase Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	95%	76.380.000	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP	Persentase Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	95%	86.240.000	
	5.					Pembinaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Pembinaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	95%	223.600.000	
	6. Pelatihan Pengendalian Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	95%	64.275.000	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau	Persentase Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	95%	64.275.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		55.204.000			Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		280.895.900	
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95%	55.204.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95%	55.204.000	

	2.					Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Satpol PP	Persentase Penyusunan Dokumen RKA dan DPA	95%	4.515.150		
	3.					Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Satpol PP	Persentase Penyusunan Dokumen LPPD	95%	62.160.250		
	4.					Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satpol PP	Persentase Penyusunan Dokumen SPM	95%	3.081.250		
	5.					Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP)	Satpol PP	Persentase Penyusunan Dokumen Lakip	95%	3.535.250		
	6.					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Satpol PP	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	95%	32.400.000		
	7.					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP	Persentase Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	95%	60.000.000		
	8.					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Satpol PP	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	95%	60.000.000		
VI	Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda		713.921.000			Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda		1.444.330.000		
	1.	Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	95%	93.830.000	Monitoring, evaluasi dan identifikasi pelanggaran perda	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	95%	150.000.000	
	2.	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengawasan Pedagang Kaki Lima	95%	84.980.000	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengawasan Pedagang Kaki Lima	95%	84.980.000	

	3.	Pengawasan , Pengendalian dan Penertiban Kantatibmas	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantatibmas	95%	108.235.000	Pengawasan , Pengendalian dan Penertiban Kantatibmas	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantatibmas	95%	206.228.000	
	4.						Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	95%	300.000.000	
	5.	Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%	165.502.000	Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%	165.502.000	
	6.	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	95%	197.099.000	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	95%	197.099.000	
	7.						Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan		Persentase Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	95%	140.175.000	
	8.						Penyusunan Raperda Tibum	Satpol PP	Persentase Penyusunan Raperda Tibum	95%	116.541.000	
	9.						Penertiban Alat Peraga Kampanye	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penertiban Alat Peraga Kampanye	95%	19.530.000	
VII	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			Rasio Petugas LINMAS		65.210.000			Rasio Petugas LINMAS		673.370.000	
	1.	Mobilisasi dan pendataan satuan perlindungan masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	95%	65.210.000	Mobilisasi dan pendataan satuan perlindungan masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	95%	65.210.000	

	2.					Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapan Anggota Satlinmas	Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Empanang dan Puring Kencana	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapan Anggota Satlinmas	95%	302.760.000	
	3.					Monitoring Pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan oleh Satlinmas di Desa	Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Empanang dan Puring Kencana	Persentase Monitoring Pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan oleh Satlinmas di Desa	95%	222.600.000	
	4.					Peningkatan Peran Serta Satlinmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan/ Desa	Kelurahan Hilir Kantor & Kelurahan Putussibau Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Satlinmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan/ Desa	95%	82.800.000	
VIII	Peningkatan Kapasitas LINMAS		Persentase Anggota LINMAS terlatih		358.420.000			Persentase Anggota LINMAS terlatih		775.338.000	
	1. Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	95%	358.420.000	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	95%	358.420.000	
	2.					Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	23 Kecamatan	Persentase Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	95%	357.380.000	

	3.					Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tentang Kesiapsiagaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	Pontianak dan Jakarta	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tentang Kesiapsiagaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	95%	59.538.000		
IX	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam		Cakupan Wilayah rawan bencana		1.136.299.000			Cakupan Wilayah rawan bencana		1.194.156.000		
	1.	Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana	30%	102.550.000						
	2.	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	30%	172.270.000	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	30%	172.270.000	
	3.						Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	Pontianak	Prosentase koordinasi dan konsultasi tentang bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan dalam 1 tahun	95%	80.488.000	
	4.						Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kebencanaan Keluar Daerah	BPBD Provinsi dan Pusat	Persentase koordinasi dan sinkronisasi program kebencanaan keluar daerah	95%	79.919.000	
	5.	Pembentukan Kelompok Masyarakat/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas	30%	51.400.000	Pembentukan Kelompok Masyarakat/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas	30%	51.400.000	

			Hulu					Hulu			
6.	Sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	30%	164.830.000	Sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	30%	164.830.000	
7.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	20%	27.900.000	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	20%	27.900.000	
8.	Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	75%	16.010.000	Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	75%	16.010.000	
9.	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	75%	12.800.000	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	75%	12.800.000	
10.	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	45%	76.350.000	satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	45%	76.350.000	
11.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	45%	54.000.000	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	45%	54.000.000	
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	20%	388.270.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	20%	388.270.000	

13.	Simulasi Pengendalian Kebakaran	Satpol PP	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	95%	22.579.000	Simulasi Pengendalian Kebakaran	Satpol PP	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	95%	22.579.000		
14.	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Putussibau	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	95%	47.340.000	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Putussibau	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	95%	47.340.000		
<u>TOTAL</u>					<u>9.121.548.700</u>	<u>TOTAL</u>					<u>13.889.055.400</u>	-



LAMPIRAN IV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020		
		Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran			5.502.275.500				6.052.503.050
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	95%	4.900.000	APBD		95%	5.390.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pembayaran air, listrik, telpon dan jaringan internet	Satpol PP	95%	46.200.000	APBD		95%	50.820.000
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Satpol PP	95%	18.725.000	APBD		95%	20.597.500
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol PP	95%	117.540.000	APBD		95%	129.294.000
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol PP	95%	35.600.000	APBD		95%	39.160.000
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satpol PP	95%	86.376.500	APBD		95%	95.014.150
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	95%	31.375.000	APBD		95%	34.512.500
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satpol PP	95%	15.980.000	APBD		95%	17.578.000
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP	95%	101.850.000	APBD		95%	112.035.000
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpol PP	95%	12.000.000	APBD		95%	13.200.000
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Satpol PP	95%	338.750.000	APBD		95%	372.625.000
	12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ibukota Provinsi dan Pemerintah Pusat	95%	615.938.000	APBD		95%	677.531.800

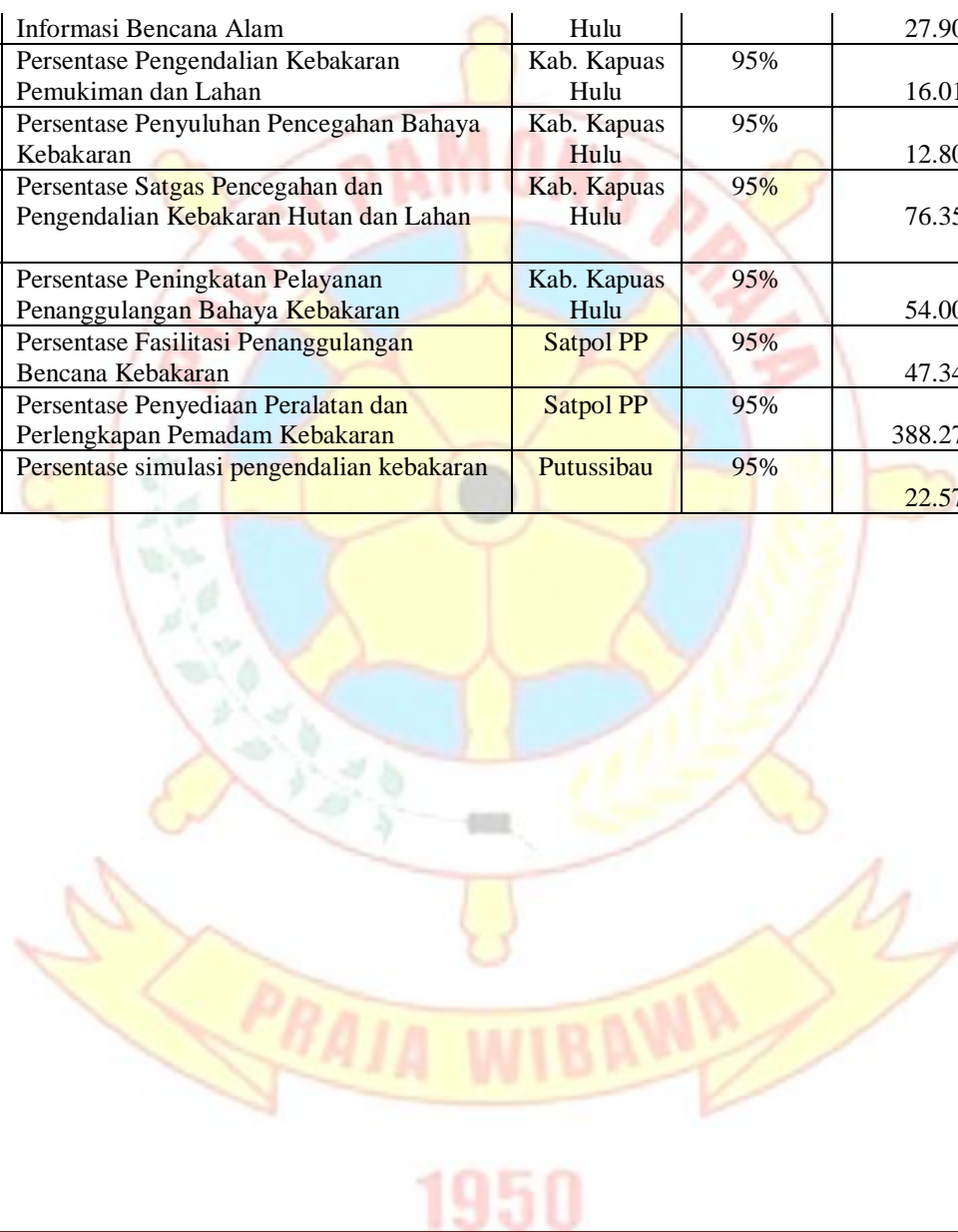
	13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Kapuas Hulu	95%	542.400.000	APBD		95%	596.640.000
	14. Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Persentase Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kab. Kapuas Hulu	95%	538.327.000	APBD		95%	592.159.700
	15. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Persentase Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	Satpol PP	95%	2.804.400.000	APBD		95%	3.084.840.000
	16. Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase Penyediaan Jasa Publikasi	Kab. Kapuas Hulu	95%	15.000.000	APBD		95%	16.500.000
	17. Pelaksanaan Analisis Jabatan	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan	Satpol PP	95%	12.900.000	APBD		95%	14.190.000
	18. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Satpol PP	95%	84.014.000	APBD		95%	92.415.400
	19. Pengelolaan Pengembangan Website Satpol PP	Persentase Pengelolaan Pengembangan Website Satpol PP	Satpol PP	95%	80.000.000	APBD		95%	88.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK			2.303.200.000				2.533.520.000
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satpol PP	95%	1.691.300.000	APBD		95%	1.860.430.000
	2. Pengadaan Mebeleur	Persentase pengadaan mebeleur	Satpol PP	95%	32.550.000	APBD		95%	35.805.000
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase terlaksananya pemeliharaan/berkala kendaraan dinas operasional	Sat Pol PP	95%	450.000.000	APBD		95%	495.000.000
	4. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Sat Pol PP	95%	129.350.000	APBD		95%	142.285.000
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya			271.350.000				298.485.000
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sat Pol PP	95%	191.350.000	APBD		95%	210.485.000
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Persentase Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Sat Pol PP	95%	80.000.000	APBD		95%	88.000.000
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten			1.508.415.000				1.659.256.500
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibukota provinsi dan luar ibukota provinsi	95%	940.350.000	APBD		95%	1.034.385.000
	2. Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Persentase Kesamaptaan Polisi Pamong	Sat Pol PP	95%	46.450.000	APBD		95%	51.095.000

		Praja							
	3. Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Prosentase penyelenggaraan bimtek dasar polisi pamong praja dalam 1 tahun	Satpol PP	95%	147.500.000	APBD		95%	162.250.000
	4. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP kab.KH	95%	86.240.000	APBD		95%	94.864.000
	5. Pembinaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Persentase Pembinaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	95%	223.600.000	APBD		95%	245.960.000
	6. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau	95%	64.275.000	APBD		95%	70.702.500
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			280.895.900				308.985.490
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sat Pol PP	95%	55.204.000	APBD		95%	60.724.400
	2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Persentase Penyusunan Dokumen RKA dan DPA	Sat Pol PP	95%	4.515.150	APBD		95%	4.966.665
	3. Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Persentase Penyusunan Dokumen LPPD	Sat Pol PP	95%	62.160.250	APBD		95%	68.376.275
	4. Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase Penyusunan Dokumen SPM	Satpol PP	95%	3.081.250	APBD		95%	3.389.375
	5. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP)	Persentase Penyusunan Dokumen Lakip	Satpol PP	95%	3.535.250	APBD		95%	3.888.775
	6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Sat Pol PP	95%	32.400.000	APBD		95%	35.640.000
	7. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP	95%	60.000.000	APBD		95%	66.000.000
	8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Satpol PP	95%	60.000.000	APBD		95%	66.000.000
VI	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda			1.380.055.000				1.518.060.500
	1. Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kab. Kapuas Hulu	95%	150.000.000	APBD		95%	165.000.000
	2. Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Persentase Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kab. Kapuas Hulu	95%	84.980.000	APBD		95%	93.478.000

	3. Pengawasan , Pengendalian dan Penertiban Kantratribmas	Persentase Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Kab. Kapuas Hulu	95%	206.228.000	APBD		95%	226.850.800
	4. Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu	95%	165.502.000	APBD		95%	182.052.200
	5. Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Persentase Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	95%	300.000.000	APBD		95%	330.000.000
	6. Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Persentase Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kab. Kapuas Hulu	95%	197.099.000	APBD		95%	216.808.900
	7. Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	Persentase Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	Satpol PP	95%	140.175.000	APBD		95%	154.192.500
	8. Penyusunan Raperda Tibum	Persentase Penyusunan Raperda Tibum	Satpol PP	95%	116.541.000	APBD		95%	128.195.100
	9. Penertiban Alat Peraga Kampanye	Persentase Penertiban Alat Peraga Kampanye	Kab. Kapuas Hulu	95%	19.530.000	APBD		95%	21.483.000
VII	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS			673.370.000				740.707.000
	1. Mobilisasi dan pendataan satuan perlindungan masyarakat	Persentase Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	95%	65.210.000	APBD		95%	71.731.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapan Anggota Satlinmas	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapan Anggota Satlinmas	Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Empanang dan Puring Kencana	95%	302.760.000	APBD		95%	333.036.000
	3. Monitoring Pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan oleh Satlinmas di Desa	Persentase Monitoring Pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan oleh Satlinmas di Desa	Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Empanang dan Puring Kencana	95%	222.600.000	APBD		95%	244.860.000

	4. Peningkatan Peran Serta Satlinmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan/ Desa	Persentase Peningkatan Peran Serta Satlinmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan/ Desa	Kelurahan Hilir Kantor & Kelurahan Putussibau Kota	95%	82.800.000	APBD		95%	91.080.000
VIII	Peningkatan Kapasitas LINMAS				775.338.000				852.871.800
	1. Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	95%	358.420.000	APBD		95%	394.262.000
	2. Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	23 Kecamatan	95%	357.380.000	APBD		95%	393.118.000
	3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tentang Kesiapsiagaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tentang Kesiapsiagaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	Pontianak dan Jakarta	95%	59.538.000	APBD		95%	65.491.800
IX	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Cakupan Wilayah rawan bencana			1.194.156.000				1.313.571.600
	1. Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Persentase Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Kab. Kapuas Hulu	95%	172.270.000	APBD		95%	189.497.000
	2. Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase koordinasi dan konsultasi tentang bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan dalam 1 tahun	Pontianak	95%	80.488.000	APBD		95%	88.536.800
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kebencanaan Keluar Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi program kebencanaan keluar daerah	BPBD Provinsi dan Pusat	95%	79.919.000	APBD		95%	87.910.900
	4. Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	95%	51.400.000	APBD		95%	56.540.000
	5. Sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	95%	164.830.000	APBD		95%	181.313.000
	6. Pemantauan dan Penyebarluasan	Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan	Kab. Kapuas	95%		APBD		95%	30.690.000

	Informasi Bencana Alam	Informasi Bencana Alam	Hulu		27.900.000				
7.	Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Persentase Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	95%	16.010.000	APBD		95%	17.611.000
8.	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	95%	12.800.000	APBD		95%	14.080.000
9.	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	95%	76.350.000	APBD		95%	83.985.000
10.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	95%	54.000.000	APBD		95%	59.400.000
11	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Satpol PP	95%	47.340.000	APBD		95%	52.074.000
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Satpol PP	95%	388.270.000	APBD		95%	427.097.000
13.	Simulasi Pengendalian Kebakaran	Persentase simulasi pengendalian kebakaran	Putussibau	95%	22.579.000	APBD		95%	24.836.900



LAMPIRAN V

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Kapuas Hulu
Kota Putussibau

NamaSKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (%)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1 Tahun	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP		1 Tahun	
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Satpol PP		1 Tahun	
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol PP		1 Tahun	
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol PP		1 Tahun	
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satpol PP		1 Tahun	
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP		1 Tahun	
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP		1 Tahun	
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP		1 Tahun	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Satpol PP		1 Tahun	
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol PP		1 Tahun	
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ibukota Provinsi dan Pemerintah Pusat		1 Tahun	
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	

	Daerah				
	14. Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	15. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Satpol PP		1 Tahun	
	16. Penyediaan Jasa Publikasi	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	17. Pelaksanaan Analisis Jabatan	Satpol PP		12 bulan	
	18. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Satpol PP		12 bulan	
	19. Pengelolaan Pengembangan Website Satpol PP	Satpol PP		1 Tahun	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satpol PP	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	1 Tahun	
	2. Pengadaan Mebeleur	Satpol PP		1 Tahun	
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Sat Pol PP		1 Tahun	
	4. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Sat Pol PP		1 Tahun	
III	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sat Pol PP	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 Tahun	
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Sat Pol PP		1 Tahun	
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibukota provinsi dan luar ibukota provinsi	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	1 Tahun	
	2. Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP		1 Tahun	
	3. Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Satpol PP		45 Orang	
	4. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP		1 Tahun	
	5. Pembinaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	

	6.	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau		1 Tahun	
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sat Pol PP	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Tahun	
	2.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sat Pol PP		1 Tahun	
	3.	Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Satpol PP		12 bulan	
	4.	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satpol PP		1 Tahun	
	5.	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP)	Sat Pol PP		1 Tahun	
	6.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Sat Pol PP		1 Tahun	
	7.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP		1 Tahun	
	8.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Satpol PP		1 Tahun	
VI	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					
	1.	Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	2.	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	3.	Pengawasan , Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	4.	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	5.	Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	6.	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	7.	Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	Satpol PP		1 Tahun	
	8.	Penyusunan Raperda Tibum	Satpol PP		1 Tahun	
	9.	Penertiban Alat Peraga Kampanye	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
VII	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
	1.	Mobilisasi dan pendataan satuan perlindungan	Kab. Kapuas Hulu	Rasio Petugas	1 Tahun	

	masyarakat		LINMAS		
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapan Anggota Satlinmas	Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Empanang dan Puring Kencana		1 Tahun	
	3. Monitoring Pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan oleh Satlinmas di Desa	Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Empanang dan Puring Kencana		1 Tahun	
	4. Peningkatan Peran Serta Satlinmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan/ Desa	Kelurahan Hilir Kantor & Kelurahan Putussibau Kota		1 Tahun	
VIII	Peningkatan Kapasitas LINMAS				
	1. Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Anggota LINMAS terlatih	1 Tahun	
	2. Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	23 Kecamatan		1 Tahun	
	3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tentang Kesiapsiagaan Anggota Satlinmas Menjelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	Pontianak dan Jakarta		1 Tahun	
IX	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam				
	1. Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Wilayah rawan bencana	1 Tahun	
	2. Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kebencanaan Keluar Daerah	Kab. Kapuas Hulu			
	4. Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	

5.	Sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	
6.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	
7.	Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	
8.	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	
9.	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	
10.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	
11.	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Satpol PP	1 Tahun	
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Satpol PP	1 Tahun	
13.	Simulasi Pengendalian Kebakaran	Putussibau	1 Tahun	

